

RINGKASAN

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kota Pekanbaru. (Studi Kasus di Kecamatan Tampan) (Peneliti : Sofia Achnes, Lena Farida, Mariati Ibrahim)

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2011 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan : 1). untuk mengidentifikasi aspek penunjang pelaksanaan pengelolaan program kebersihan, keindahan dan ketertiban, (K3) berdasarkan aspek kebijakan pendukung, masyarakat, kelembagaan dan infrastruktur; 2) Mengevaluasi pelaksanaan program K3 di Kecamatan Tampan berdasarkan identifikasi aspek penunjang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling kebetulan (*accidental sampling*). Responder dalam penelitian ini adalah masyarakat yang beraktivitas, di Kecamatan Tampan. Jumlah sampel yang diteliti adalah 100 orang, di samping itu juga dikumpulkan informasi yang berkenaan dengan program K3 pada petugas Kecamatan Tampan yang memahami program K3. Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan K3 pada Kecamatan Tampan sebesar 48 % yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan K3 adalah kurang baik, hal ini disebabkan karena kekurangan armada kebersihan sehingga pengelolaan sampah tidak terlaksana dengan baik. Kemudian sebanyak 32 % dari responden mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan K3 adalah cukup baik hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan ronda malam

untuk menjaga ketertiban. Selanjutnya sebanyak 20 % responden menyatakan bahwa K3 adalah baik, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan penghijauan dan penggunaan penerangan yang telah dilaksanakan dengan baik.

Dari analisis identifikasi kebijakan pendukung, pelaksanaan Perda /SK Camat Tampan tentang K3 ternyata kebijakan pendukung yang memiliki substansi hukum yang sebenarnya diimplementasikan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Namun pada kenyataan kebijakan pendukung yang ada juga tidak diimplementasikan secara benar sehingga aturan yang ada berbeda dengan kenyataan di lapangan. Seperti penataan reklame yang sudah ditetapkan kawasan bebas reklame. Masalah PKL juga belum diatur secara khusus sehingga masih ada PKL yang ber ualan sembarangan.

Dari hasil identifikasi aspek masyarakat dalam pelaksanaan Perda /SK tentang K3 ternyata dari tanggapan responden tentang pelaksanaan program K3 di Kecamatan Tampan berada dari dalam kategori sedang dan tinggi, hanya 6 % dari responden yang memberikan tanggapan dalam kategori rendah. Pengetahuan responden tergolong sedang yaitu sebesar 63 %. Persetujuan responden tentang pelaksanaan K3 tergolong tinggi yaitu sebesar 56% dan kesiapan untuk menaati tergolong tinggi yaitu sebesar 62 %.

Tanggapan responden menunjukkan tanggapan yang baik dalam rangka menyambut penyelenggaraan SK Camat tentang Panduan Pelaksanaan K3. Dalam

proses sosialisasi terlihat bahwa tingkat pengetahuan yang masih sedang maka pemerintah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.

Dari hasil identifikasi Aspek Kelembagaan dalam pelaksanaan Perda /SK Camat tentang K3 ternyata dalam usahanya untuk menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan pengamen, Dinas Sosial masih memiliki keterbatasan, dalam hal ini belum memiliki panti sosial khusus bagi tuna sosial di Kota Pekanbaru. Hal ini akan berpengaruh negatif dalam penyelenggaraan ketertiban. di Kota Pekanbaru karena pertumbuhan tuna sosial yang semakin pesat setiap tahun.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penataan reklame. Namun berdasarkan ketentuan yang ada tentang penetapan titik reklame maka terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan izin penempatan reklame dikawasan bebas reklame.

Dari hasil identifikasi Aspek Infrastruktur dalam Pelaksanaan Perda /SK Camat tentang K3 ternyata fasilitas persampahan untuk mendukung penyelenggaraan kebersihan terlihat belum proposional dengan panjang jalan, karena tidak sesuai dengan jumlah ideal yang ada yaitu jarak 50 m harus disediakan 1 tempat sampah.

Hasil evaluasi pelaksanaan ketentuan kebersihan ternyata aturan tentang kawasan bebas merokok belum ada diberikan sanksi kepada perokok yang melanggar aturan. Aturan tentang buang sampah sembarangan belum diatur tentang aparat yang berhak melakukan teguran.

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan keindahan ternyata aturan tentang tempelan sembarangan kertas reklame/brosur belum didukung oleh kebijakan pendukung yang mengatur tentang tempat penetapan jenis reklame selebaran dan brosur. Jenis reklame ini juga memiliki ijin dari pemerintah sehingga perlu penetapan tempat yang memadai.

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari aspek kebijakan pendukung terlihat kebijakan pendukung PKI, belum ada sinkronisasi antara Perda/SK Camat tentang K3 dengan kebijakan pendukung yang dapat menyelesaikan permasalahan dasar karena memiliki aturan yang lebih detail dalam melakukan penataan dan belum ada kebijakan khusus tentang penataan PKL sehingga kondisi ini membuat pelaksanaan Perda/SK tentang K3 tidak akan efektif.

Aturan gelandangan, pengemis dan pengamen yang akan dilakukan pembinaan belum mencantumkan berapa lama pars gelandangan dan pengemis tersebut dilakukan pembinaan di Panti Sosial. Sedangkan untuk kebijakan pendukung penanganan masalah kesejahteraan Kota Pekanbaru belum didukung oleh implementasi Perda yang konsisten. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pendukung yang dapat menyelesaikan masalah juga tidak efektif sehingga aturan K3 yang hanya melarang tidak akan efektif.

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari perspektif masyarakat ternyata kondisi ketertiban terlihat masih terganggu. Di beberapa tempat yang diidentifikasi seperti simpang empat arengka dan simpang Panam terdapat

kegiatan liar seperti pengamen, pengemis dan pasar tumpah yang mengganggu K3. Selain itu, berdasarkan karakteristik lokasi, keberadaan gelandangan, pengamen dan coretan serta tempelan kertas sangat mengganggu nilai estetika kota.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan Perda /SK K3 akan berpengaruh pada perilaku masyarakat. Masih terlihat perilaku negatif atau menunjukkan masih kurangnya sosialisasi. Dari beberapa perilaku negatif yang melanggar aturan K3 dapat dikatakan bahwa tingkat pelanggaran yang akan sulit untuk ditertibkan adalah menyeberang sembarangan dan buang sampah sembarangan. Hal ini akan sangat sulit untuk melakukan pemantauan karena melibatkan seluruh masyarakat sebagai calon pelanggar dan juga tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat sehingga diperlakukanaa pendekatan yang tepat, serta lokasinya yang tidak tentu.

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari perspektif kelembagaan temyata dalam penegakkannya belum secara penuh aturan K3 ditegakkan dan bare dari beberapa diantaranya. Seperti penertiban kegiatan PKI, gelandang, pengemis dan pengamen, tertib menyeberang, tertib tuna susila namun tidak efektif karena belum secara jelas **dan** rinci tentang aturan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan masih lemah sehingga fakta dilapangan menunjukkan pelanggaran yang tedadi diluar kendali aparat. Aktivitas PKL, gelandangan dan pengemis kembali beraktivitas karena Satpol PP memiliki keterbatasan personil.. Sedangkan elemen pemerintah kecamatan hanya dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan yang tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat sehingga dalam pelaksanaan panduan tentang program K3 tidak efektif.

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari perspektif infrastruktur ternyata fasilitas umum yang tersedia di Kecamatan Tampan menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria yang ada. Fasilitas penyeberangan seperti jembatan penyeberangan belum tersedia sama sekali. Seperti terlihat di Simpang Empat Arengka, simpang Purwodadi Indah, dimana pada kawasan tersebut sangat ramai dilewati oleh kendaraan bermotor dan pejalan kaki, akan menimbulkan tingkat pelanggaran tertib jalan yang semakin tinggi.

Untuk dapat melaksanakan program K3 dengan baik, maka pemerintah harus lebih meningkatkan komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi menggunakan sarana/media maupun penyuluhan-penyuluhan mengenai pelaksanaan K3 sehingga masyarakat lebih pahaam mengenai tugas dan tanggung

4D

jawab sebagai warga yang baik untuk dapat mendukung terlaksananya program K3 dan menjadikan Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan sebagai kota yang bersih, indah dan tertib.

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pelaksanaan K3 seperti menambah armada petugas kebersihan, mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk memberikan pengarahan tentang pentingnya kebersihan, keindahan dan menjaga ketertiban.

Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan seperti membuang sampah sembarangan, mendirikan bangunan-bangunan liar dipinggir jalan dan mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga apabila ditemukan adanya masyarakat yang kurang

mendukung program K3 dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka pemerintah langsung memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat tersebut jera dan memberikan contoh agar masyarakat lain tidak berbuat hal yang sama sehingga tujuan dari program K3 dapat tercapai.

Pemerintah juga diharapkan untuk lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan pelaksanaan K3 sehingga apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam pelaksanaan K3 dapat langsung dilakukan evaluasi.